



**Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama**

**P-ISSN: 1907-1736, E-ISSN: 2685-3574**

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>

Volume 14, Nomor 2, Juli - Desember, 2019

DOI: <https://doi.org/10.24042/ajsla.v14i2.5613>

---

## **GENOSIDA ETNIS MUSLIM ROHINGYA DAN PARTISIPASI INDONESIA DALAM BINA DAMAI**

**Moh Rosyid**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Jateng

*mrosyid72@yahoo.co.id*

### **Abstract**

*This paper is based on writings that are genocide on ethnic Rohingya and newspaper coverage. Data were analyzed with a qualitative descriptive approach. Indonesia is a country that is independent but actively participates in global politics including in the case of state or majority oppression against minority ethnic or group, such as the case of Rohingya in Myanmar. Rohingya is a muslim minority ethnic living in Myanmar targeted in genocide and banished from the country under the military government. Meanwhile, the civil leader of Myanmar, Aung Sang Suu Kyi, remains silent despite her Peace Prize Nobel. On the other hand, the political stance of ASEAN needs to be strengthened to find the solution for Rohingya without intervening internal affairs of the country. Indonesia has supported Rohingya people both by delivering humanity aids, such as building school, hospital and providing basic needs, as well as persuading Myanmar government by means of diplomacy to protect Rohingya people. This kind of humanity acts should be maintained for the sake of human rights. Thus, Indonesia needs to ratify the Convention on Refugees of 1951.*

### **Abstrak**

*Terbatasnya tulisan yang mendeskripsikan genosida yang dialami etnis Rohingya yang melatarbelakangi ditulisnya naskah ini. Data naskah ini bersumber dari tulisan pakar yang konsen pada etnis Rohingya dan pemberitaan koran. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pelaksanaan politik bebas dan aktif yang dipegang teguh Indonesia sebagai bukti bangsa yang*

*peduli terhadap kehidupan global, terutama yang diderita oleh etnis minoritas atas arogansi negara atau etnis mayoritas. Sebagai etnis muslim minoritas di Myanmar, Rohingya mendapatkan perlakuan genosida dan diusir dari negaranya oleh pemerintahan Myanmar yang dikuasai militer. Di sisi lain, Aung Sang Suu Kyi belum mampu memerankan dirinya sebagai pionir yang telah mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dengan demikian, peran negara dunia, terutama ASEAN yang hingga kini belum optimal perlu dicarikan jalan keluar agar prinsip nonintervensi persoalan negara anggota menjadi peduli akan terwujud. Kepedulian Indonesia dalam memberi bantuan kemanusiaan dan diplomatik atas nasib yang diderita etnis Rohingya diperkuat dengan kiprah civil society dalam membangun infrastruktur dasar, seperti sekolah, rumah sakit, dan kebutuhan dasar pengungsi harus berkelanjutan. Bila tidak, nasib Rohingya tak akan hidup nyaman karena kepentingan mayoritas yang mendominasi minoritas selalu muncul karena lemahnya kesadaran hidup sebagai umat beragama (apa pun) dengan benar. Memahami fakta yang diderita etnis Rohingya, perlunya Indonesia menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951.*

**Keywords:** Rohingya, refugee, politics

## **A. Pendahuluan**

Kekuatan pemerintahan adidaya yang dimiliki sebuah rezim tidak selalu memosisikan minoritas sebagai warga yang disejahatkan, tetapi diposisikan sebagai pihak yang dirugikan. Perang dan konflik semakin membuat posisi tawar minoritas makin rendah. Bahkan, persekusi dan pelanggaran HAM secara masif menyebabkan 65,3 juta penduduk dunia menjadi pengungsi. Jumlah itu lebih banyak dibanding jumlah warga negara Perancis tahun 2016 yang hanya 64,4 juta orang. Dalam waktu dua tahun, jumlah pengungsi dunia meningkat menjadi 5 juta, akhir tahun 2014 menjadi 59,5 juta orang pengungsi. Sepanjang 2015, sebanyak 107.100 pengungsi mendapatkan penempatan di 30 negara, termasuk Indonesia. Tahun 2015, Indonesia berhasil memulangkan 800 migran Bangladesh yang terdampar di pesisir timur Aceh.<sup>1</sup> Upaya Indonesia ini sesuai politik luar negerinya yang bebas aktif. Bebas bermakna tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia, sedangkan aktif maksudnya

---

<sup>1</sup> *Kompas*, 21 Juni 2016.

melibatkan diri dalam mewujudkan perdamaian dunia serta ikut menyelesaikan permasalahan internasional. Ragam permasalahan negara lain dipilah dalam hal konflik antar-negara, konflik yang dialami suatu negara, dan konflik yang diderita etnis di suatu negara. Peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik yang diderita etnis di suatu negara memerlukan strategi adaptif agar tidak mengundang persoalan baru dengan negara di mana etnis itu berada.

Penderitaan selalu dialami etnis imbas upayanya meninggalkan negaranya untuk mencari perlindungan. Pada awalnya harapan untuk mengubah hidup lebih baik dianggarkan para pengungsi, sebagaimana dialami etnis Rohingya dan warga Banglades. Mereka bersedia membayar uang agar bisa meninggalkan negaranya, meski diselundupkan oleh oknum. Ketatnya pengamanan Angkatan Laut Malaysia dan Thailand membuat kapal mereka tertahan di tengah laut selama 40 hari tanpa kepastian. Dalam kondisi itu, rentan terjadi pemerkosaan dan rentan menderita sakit. Mereka pergi dari Myanmar karena pemerintahannya tidak mengakui sehingga di antara pengungsi tidak memiliki tujuan, asal keluar dari Myanmar. Ada pengungsi yang bersandar di Aceh, pertama kali ditampung di Pelabuhan Kuala Langsa, Aceh Timur. Pengungsi siap ditempatkan di negara mana pun. Ratusan imigran Rohingya Myanmar dan Bangladesh kelaparan di tengah laut sehingga mereka meminum air laut. Perjalanan pun tak tahu arah di tengah kehabisan makanan dan bahan bakar sehingga memanfaatkan terpal plastik untuk layar. Mereka terapung empat bulan di tengah laut karena pertolongan dari Tentara AL Thailand tidak mampu menampung banyaknya imigran sehingga mereka meninggalkan pengungsi dan dilepas di tengah laut lepas. Para imigran tidak berani melawan petugas yang menolong karena mereka bersenjata. Banyaknya jumlah imigran dan terbatasnya perahu yang ditumpangi sehingga terjadi rebutan antara imigran Rohingya dengan Banglades tatkala meninggal dilempar ke laut. Perjalanan mereka melalui cukong penyelundup dengan membayar 20.000 kyat (sekitar Rp 240.000 berdasarkan kurs resmi). Pengungsi dijanjikan pekerjaan di Malaysia dan Thailand. Di tengah laut terkatung-katung, mereka diselamatkan oleh nelayan Aceh dan singgah di Aceh. Warga Rohingya lebih suka meninggalkan negaranya Myanmar karena diskriminasi yang dideritanya, seperti tidak boleh memiliki telepon seluler, bila ketahuan dipenjara atau didenda.

Membebaskan dari penjara dengan membayar Rp 40 juta.<sup>2</sup> Sebuah kapal kayu kecil nelayan sarat ratusan penumpang lelaki, perempuan, dan anak-anak terombang-ambing selama 3 bulan di Laut Andaman, antara perairan Thailand dan Malaysia. Mereka korban calo pembawa pengungsi yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia dan Thailand. Calo, nahkoda, dan kru kapal meninggalkan pencari kerja dijemput oleh kapal lain yang berisi beberapa orang yang bersenjata. Pengungsi sebagian sakit dan yang tewas dilempar di laut. Nasib pengungsi kian merana karena kapal Angkatan Laut Thailand mendatangnya di tengah laut hanya memberi makanan dan minuman seadanya lalu mendorong kapalnya menjauhi pantai Thailand. Begitu pula Malaysia dan Indonesia. Evakuasi hanya pada pengungsi yang kapalnya tenggelam. Ketiga negara 'bermain pingpong' sehingga dikecam keras lembaga kemanusiaan internasional (IOM) dan UNHCR (PBB). Data PBB sejak 2013-2015 terdapat 120.000 manusia perahu (*boat people*) meninggalkan Myanmar dengan kapal seadanya.<sup>3</sup>

Keterlibatan Indonesia pada pengungsi didorong sifat kemanusiaan yang ada di depan mata. Hal ini sebagaimana diderita Mohammad Khan, 39 tahun, pengungsi asal Mongdo, etnis Rohingya dari Myanmar menunggu selama 16 tahun di pengungsian. Ia mengungsi karena konflik tahun 1995 di negaranya. Saat itu ia menumpang kapal nelayan Thailand dan sempat dipekerjakan sebagai awak kapal, ia menyusuri perairan menuju Malaysia. Selama berbulan-bulan terkatung-katung di laut, berpindah-pindah dari kapal ke kapal lain. Akhirnya didaratkan di perbatasan Thailand-Malaysia yang akhirnya tiba di Kualalumpur Malaysia. Tahun 2000 ia mendarat dengan status pengungsi dari Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees*, UNHCR) Malaysia. Di Kuala Lumpur, Khan bertemu dengan perempuan asal Lhoksumawe Aceh, Marwani hingga menikah dan dikaruniai tiga anak. Tahun 2012, Khan mengantarkan sang isteri ke Aceh. Baru tiga hari di Aceh, ia ditangkap sehingga ia beserta keluarganya bertempat tinggal di penampungan sementara di Medan. Di penampungan, Marwani melahirkan si kembar, Nuriza dan Nurina dengan status sang bapak/ibu sebagai pengungsi sehingga si kembar tak memiliki akta lahir. Khan pun tak berharap kembali ke negara asalnya yakni

---

<sup>2</sup> *Kompas*, 24 Mei 2015

<sup>3</sup> *Kompas*, 17 Mei 2015.

Myanmar karena trauma.<sup>4</sup> Jauh sebelumnya, 22 Mei 1975 para pengungsi mendarat di Pulau Laut (pulau terluar di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau) selama bertahun-tahun dan disusul pengungsi lain. Tahun 1979 Indonesia menerima pengungsi dari Indochina dan pengungsi lain. Pada 3 September 1996 kampung pengungsi ditutup setelah para pengungsi menuju ke negara tujuan.

Fakta penderitaan yang dialami etnis muslim Rohingya di wilayah Rakhine (negara bagian Myanmar) menjadi perhatian dunia dan pemerintah Indonesia karena bagian dari aksi politik luar negeri. Ada dua hal dasar respon Indonesia dalam keterlibatan ini. Pertama, etnis Rohingya yang menyelamatkan diri dari perlakuan tak bijak oleh penguasa Myanmar dengan menyeberangi samudera, ada yang terdampar di wilayah Indonesia. Kedua, mayoritas etnis Rohingya tersebut adalah muslim. Dengan demikian, perlunya memahami aksi nyata yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi etnis muslim Rohingya yang terdampar di wilayah Indonesia maupun upaya jemput bola dalam diplomasi dan memberi bantuan bagi etnis Rohingya yang berada di wilayah Rakhine perspektif politik luar negeri. Meskipun demikian, awalnya PBB menuding Indonesia, Thailand, dan Malaysia mengabaikan seruannya untuk mengizinkan ribuan migran yang terdampar di laut untuk mendarat di wilayah mereka. Pengungsi terdampar di tengah laut setelah penyelundup meninggalkan pengungsi karena pihak berwenang Thailand memburu jaringan penyelundup. Menteri Pertahanan Thailand, Jenderal Pravit Wongsuwan, memperingatkan kepada kapal-kapal imigran untuk tidak memasuki wilayah negaranya tanpa izin. TNI pun menyiagakan AL dengan 4 KRI dan 1 pesawat Casa untuk menghalau pengungsi tanpa dokumen masuk ke Indonesia.<sup>5</sup> Kondisi ini menjadi menu pemberitaan media.

## **B. Pembahasan**

### **1. Jati Diri Etnis Muslim Rohingya**

Negara Myanmar semula bernama Burma/Birma beribu kota Rangoon. Secara geografis terletak di ekor anak benua India. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah utara berbatasan dengan India, sebelah timur berbatasan dengan China, dan sebelah

---

<sup>4</sup> *Kompas*, 20 Juni 2016.

<sup>5</sup> *Suara Merdeka*, 19 Mei 2015.

selatan berbatasan dengan Thailand. Burma mendapat pemerintahan sendiri di bawah Gubernur Inggris dan mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1948 dan U Nu sebagai perdana menteri dengan sistem demokrasi liberal hingga kudeta militer 1962. Pemerintahan militer menjalankan kekuasaan dengan satu-satunya partai sosialis Burma. Tahun 1974 adanya konstitusi baru yakni Republik Sosialis Persatuan Burma. Etnis minoritas di Myanmar antara lain Karen, Chin, Kachin, Shan, dan Rohingya. Islam masuk di Myanmar melalui ragam jalan. Pedagang Arab menetap di garis pantai Arakan pada abad 1 H/VII M. Negara Islam didirikan di Arakan dengan penguasa Naseeruddeen Mahmud Syah (1442-1459 M).<sup>6</sup>

Etnis Muslim Rohingya (EMR) umumnya bermukim di Negara Bagian Utara Rakhine, Myanmar yang berbatasan antara Myanmar dengan Banglades. Kedua negara itu tidak mengakui EMR sebagai warga negaranya. EMR mendapat julukan dari warga dan pejabat Myanmar ‘muslim yang tinggal di Rakhine Utara’. Menurut Singh, konflik rasial di Myanmar sejak pemerintahan Inggris di Burma (kini beralih nama Myanmar). Minoritas Rakhine di Arakan oleh warga (pribumi) disebut Bengali/Bengalis sebagai julukan diskriminatif.<sup>7</sup> Julukan tersebut hingga kini masih melekat. Dalam sejarahnya, tahun 957 M Arakan dihuni oleh satu ras Dravidia. Pendudukan Mongolia menggulingkan Dinasti Indic Versali yang berkuasa. Tahun 1430-1784 Kerajaan Arakan didirikan oleh Min Saw Mum di Mrauk U. Raja-raja Buddhis Arakan menggunakan gelar muslim. Tahun 1784 orang Burma di bawah Bodawpaya menyerbu Arakan dan menguasainya, tetapi pada tahun 1826 Burma menyerahkan Arakan kepada Inggris. Tahun 1886 Arakan digabungkan ke dalam Burma-Inggris dan tahun 1937 kolonial Inggris menduduki provinsi Arakan dengan kekerasan dan menggabungkannya ke Burma. Myanmar memperoleh kemerdekaan pada Januari 1948 dan Arakan sebagai wilayahnya. Tahun 1962 komunitas Rohingya diakui sebagai etnis asli dari Myanmar dan memiliki perwakilan di parlemen. Tahun 1982 terbitlah UU Kewarganegaraan Myanmar yang mengeluarkan Rohingya dari etnis

---

<sup>6</sup>Saifullah. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2010, h.187.

<sup>7</sup> Bilveer Singh. *Tantangan Orang Rohingya Myanmar*. Diterjemahkan oleh Nin Bakdisoemanto *Myanmar's Rohingyas: Challenges Confronting a Persecuted Minority and Implications for Nation and Regional Security*. UGM Press: Yogyakarta. 2014, h.13.

minoritas lain, seperti Pnthay, Ba Shu, dan enam etnis lain dari daftar delapan etnis utama. Tahun 1988 lebih dari 150.000 warga Rohingya mengungsi ke luar negeri karena wilayah desanya akan dibangun sehingga tahun 2012-2017 rangkaian krisis berlangsung. EMR menetap di Rakhine sejak abad ke-7 M. Nenek moyang etnis Rohingya adalah campuran Arab, Turki, Persia, Afghanistan, dan Indo-Mongoloid.

Konflik EMR dengan warga Myanmar dipicu sengketa wilayah dengan Rakhine (etnis mayoritas) tahun 2012. Lebih dari 120 ribu orang Rohingya meninggalkan Myanmar untuk mengungsi. EMR sebagai etnis minoritas di Rakhine Arakan dan Chittagon Myanmar. EMR berjumlah 1,7 juta jiwa atau 4 % dari 42,7 jiwa warga Myanmar yang beragama Buddha. Jumlah EMR menyusut 3 juta jiwa pada 2014 dibanding catatan *Images Asia: Report on the Situation for Muslims in Burma* Mei 1997. Dalam catatan sejarah, pada abad ke-19 saat Inggris menguasai Myanmar (saat itu bernama Burma), muslim EMR masuk Myanmar dengan status kewarganegaraannya penuh. Semula imigran ini sebagai petani dan tak ada batas negara antara Myanmar dengan Banglades (kini di wilayah Arakan dan Bengal). Tapi kedatangan EMR pasca-1948 dianggap imigran ilegal dari subkontinen India, terutama adanya UU Kewarganegaraan Myanmar 1982 Rakhine tak diakui sebagai warga negara Myanmar. Catatan Lembaga HAM PBB, jumlah EMR lebih dari 800 ribu jiwa. Hak asasinya dilanggar oleh junta militer Myanmar sejak 1978 hingga kini berupa penolakan status kewarganegaraan, pembatasan kesempatan pendidikan, kekerasan sistematis berupa pembasmian etnik (genosida), pemerkosaan dan pembunuhan. EMR berkulit hitam dari Suku Tamil, berbahasa Urdu, sedangkan etnis Myanmar berkulit kuning dari ras Mongoloid.

Kampanye untuk mengisolasi warga etnis Rohingya identik dengan kebijakan rasis apartheid. Kerusuhan sektarian sejak 2012 menewaskan ratusan warga minoritas dan memaksa 140.000 orang mengungsi. Aktivis dan politisi etnis dan agama mayoritas di Rakhine mendesak Pemerintah Myanmar membatasi akses bantuan kesehatan dan kemanusiaan terhadap jutaan warga etnis Rohingya di Myanmar. Gerakan apartheid disusun Jaringan Sosial Rakhine yakni organisasi payung bagi kelompok aktivis serta partai politik yang baru terbentuk yakni Partai Nasional Arakan. Tuntutan mayoritas menuntut jatah pemerintahan otonomi lokal yang mendapatkan pendapatan daerah

dari anggaran pembangunan infrastruktur, minyak, dan gas bumi.<sup>8</sup> Untuk mengamankan jiwanya, EMR mengungsi di Teknaf (perbatasan Myanmar-Banglades) dengan berperahu yang panjangnya 6 m, lebar 4 m, kapasitas mesin 16 PK, dan 2 layar menyusuri Teluk Bengal dan Sungai Naf pasca-bentrok Juni 2013 mereka diusir setelah menyeberang. Pengungsi juga berada di Kutupalong Bangladesh tercatat 400 ribu. Eksodus EMR tahun 2009 menuju negara muslim (Kuala Idi, Pulau Sabang Aceh, Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan Arab Saudi). Tujuh eksodan terpaksa dibuang ke laut oleh sesama pengungsi setelah menjadi mayat. Sebelumnya berdomisili di Mondu, Desa Mos Kow Bis, wilayah Bau Kwi Dung sejak abad ke-7 dengan populasi sebanyak 800 ribu dari 54 juta penduduk Myanmar. Dokumentasi Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Juli 2012, terdapat 29 ribu kamp pengungsi, setiap kamp berisi 2 ribu pengungsi EMR. Wilayah Indonesia yang didampiri MER 2012 berada di Aceh 55 orang, Bogor 12 orang, Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau 107 orang. Rohingya pun mendapatkan perlakuan kekerasan oleh Junta Militer, sehingga eksodus ke Thailand. Tetapi, mereka pun disiksa karena dianggap pengungsi ilegal. Akhirnya, dalam perjalanan menuju Aceh -sebagai wilayah mayoritas muslim yang dituju selain Malaysia, Pakistan, Afganistan, dan Arab Saudi- 7 rekannya dibuang ke laut setelah menjadi mayat yang berlayar hanya mengandalkan kapal kecil. Sebelumnya mereka berdomisili di wilayah Mondu, di Desa Mos Kow Bis, wilayah Bau Kwi Dung sejak abad ke-7 dengan populasi sebanyak 800 ribu dari 54 juta penduduk Myanmar. Kedatangannya di Kuala Idi, Pulau Sabang, Aceh dalam kondisi mengenaskan.<sup>9</sup>

Kuburan massal dan kamp yang diduga untuk menyekap korban perdagangan manusia ditemukan di dekat Padang Besar dan Wang Kelian, Negara bagian Perlis Malaysia yang berbatasan dengan Provinsi Songkhla Thailand bagian selatan. Sedikitnya ditemukan ratusan jenazah yang sedang diselidiki polisi Malaysia.<sup>10</sup> Sedikitnya ditemukan 139 liang lahat yang tersebar lebih dari 20 lokasi kamp perdagangan manusia di Negara Bagian Perlis, Malaysia yang juga terserak di area dekat perbatasan Thailand hasil operasi yang

---

<sup>8</sup>*Kompas*, 20 Juni 2014, h.10.

<sup>9</sup>*Jawa Pos*, 9 April 2009.

<sup>10</sup>*Suara Merdeka*, 25 Mei 2015.

dilakukan polisi Malaysia sejak 11 Mei 2015. Jasad Korban tersebut merupakan korban penyelundupan manusia yang membayar penyelundup meski sebagai pekerja illegal di Malaysia. Penyelundup memeras keluarga korban yang sudah bekerja 1.200-1.800 dollar AS atau Rp 15,6 juta- Rp 23,4 juta per orang agar korban tetap hidup.<sup>11</sup>

## 2. Faktor Pemicu Eksodus

EMR mengungsi karena pernyataan Presiden Myanmar, Thein Sein agar EMR diungsikan di bawah naungan lembaga pengungsi PBB (UNHCR). Pemicu konflik yakni pada 28 Mei 2012 seorang wanita Buddha diperkosa dan dibunuh, warga EMR dituduh (tidak ditemukan fakta pembenar). Pada 3 Juni 2012 terdapat 10 EMR dibunuh umat Buddhis hingga konflik berkepanjangan. Di Kachin dan Rakhine, konflik meletus antara EMR dengan Buddhis, 80 EMR tewas. Data *President of the Burmese Rohingya Organization UK* (BROUK) 650 etnis Rohingya tewas, 1.200 hilang, lebih dari 80 ribu kehilangan tempat tinggal. Sejak kerusuhan, dalam catatan EMR yang tewas mencapai 6 ribu. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan, kasus EMR tanggung jawab kolektif pemimpin Myanmar. Sebelumnya, Menlu AS, Hillary Clinton 11 Juni 2012 mendesak semua pihak menghentikan kekerasan. Aun San Suu Kyi menyerukan perlindungan terhadap etnis minoritas di Myanmar melalui UU agar terjamin haknya dalam bentuk terpeliharanya bahasa, budaya, dan bebas dari kemiskinan. Solusi warga dunia terhadap EMR, terutama Indonesia (1) mengirim bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan jiwa EMR, (2) Myanmar harus mengakui keberadaan EMR sebagai warga negaranya. Kedua hal tersebut mendesak organisasi dunia seperti ASEAN, OKI, PBB, dsb sebagai langkah riil bagi EMR, (3) dilakukan pengawalan jika diskriminasi Myanmar pada EMR berlanjut karena EMR juga warganya. Hasil yang 'disuarakan' Indonesia direspon Kemenlu Myanmar pada Kedubes RI di Yangon memberi keterbukaan informasi tentang kondisi etnis EMR di negara bagian Rakhine. Sebelumnya informasi seputar EMR larangan bagi media asing masuk ke wilayah konflik. Hasil investigasi Komisioner Tinggi HAM PBB Navi Pillay, 23 Januari 2014 terjadi pembunuhan 48 nyawa perempuan dan anak etnis Rohingya. Sebelumnya, 13 Januari 2014 di Desa Du Chee Yar Tan negara

---

<sup>11</sup> *Kompas*, 26 Mei 2015.

bagian Rakhine. Berita ini ditampilkan pemerintah Myanmar, meski kebenaran data didukung laporan organisasi kemanusiaan Dokter Lintas Batas yang merawat korban.<sup>12</sup> Myanmar menuduh militan Bangladesh dalam Organisasi Solidaritas Rohingnya berada di perbatasan Bangladesh-Myanmar pemicu kerusuhan.<sup>13</sup> Myanmar akhirnya mengizinkan pada organisasi kemanusiaan dokter lintas batas (*medicin San Frontieres/MSF*) beroperasi hanya di Kachin, Shan, dan Yangon Myanmar untuk menangani HIV/Aids dan dilarang beroperasi di negara bagian Rakhine karena diisolasi dengan dunia luar. Terjadinya pelarangan karena pada Januari 2013, MSF memberi pernyataan bahwa terjadi korban tewas sebanyak 40 orang dari Rakhine dan dirawatnya imbas ulah Myanmar.<sup>14</sup> Ketidaknyamanan Rohingnya di negaranya menjadi penyebab melakukan emigrasi. Tetapi, nasib emigran Rohingnya di Malaysia bagian utara pun nista karena para penyelundup manusia tersebut disiksa dan diminta uang tebusan. Tujuan ke Malaysia bagi imigran karena di Thailand kamp pengungsian dihancurkan tentara Thailand.<sup>15</sup>

### **3. Rohingya Tidak Diakui Pemerintahan Negeranya**

Petugas sensus penduduk Myanmar Minggu, 30 Maret s.d 10 April 2014 menyensus 12 juta keluarga. Namun, minoritas Rohingya di pengungsian Te Chaung sebanyak 2.694 orang tatkala diberi pertanyaan status etnis dan dijawab 'Rohingya' seketika penyensus meninggalkannya (seharusnya terdapat 41 pertanyaan). EMR tak diakui pemerintah Myanmar dengan diterbitkan dekrit yang mewajibkannya mendaftar sebagai 'Bengali' yakni sebutan bagi imigran ilegal yang masuk dari Banglades. Hal ini ditolak keras oleh warga Rohingya karena ia lahir dan dewasa di wilayah Myanmar. Sensus (yang pertama pada 1983) didukung Badan PBB untuk Pendanaan Populasi (UNFPA) dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Kependudukan Myanmar.<sup>16</sup> UNFPA kecewa karena Myanmar tak memenuhi kesepakatan bahwa sensus dengan standar internasional dan HAM karena Myanmar melarang penggunaan istilah etnis Rohingya.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> *Kompas*, 25 Januari 2014.

<sup>13</sup> *Kompas*, 27 Januari 2014.

<sup>14</sup> *Kompas*, 6 Maret 2014.

<sup>15</sup> *Suara Merdeka*, 7 Maret 2014.

<sup>16</sup> *Kompas*, 1 April 2014

<sup>17</sup> *Kompas*, 3 April 2014.

Otoritas Myanmar pada 22 Agustus 2014 memberikan status kewarganegaraan kepada 209 warga muslim setempat yang menjadi korban sektarian yang sebelumnya ditolak. Muslim tersebut berasal dari kelompok Kaman, bukan Rohingya. Warga Rohingya keberatan bila identitasnya diubah sebagai Bengali, keinginannya tetap Rohingya.<sup>18</sup> Petugas imigrasi Myanmar juga mendata keturunan etnis Kaman, yakni salah satu dari sekian banyak etnis minoritas di Myanmar (mayoritas Buddha) yang muslim dicatat sebagai etnis Bengali. Mereka keberatan adanya peraturan bahwa semua muslim yang didata di kamp pengungsi di Myebon (negara bagian Rakhine) yang dianggap tak memiliki kewarganegaraan (*stateless*) harus mau disebut Bengali. Sebanyak 40 orang dinyatakan sah mendapat kartu identitas warga negara berwarna merah muda (status warga negara penuh) karena bisa membuktikan telah tinggal di Myanmar selama tiga generasi. Adapun 169 orang lain berhak mendapat kartu identitas berwarna hijau (diakui sebagai warga negara naturalisasi). Kartu hijau dan merah muda bermakna status dan haknya sebagai warga Myanmar diakui.

Rakhine adalah negara bagian yang sarat dengan kerusuhan. Sejak 2012, sejumlah kerusuhan berdarah memakan korban jiwa dan harta benda. Tercatat 88 orang tewas dan 140.000 dipaksa mengungsi yang mayoritas warga Rohingya. Kelompok etnis di Myanmar terdiri Burma sebanyak dua pertiga dari total warga Myanmar beragama Buddha berada di pelosok perbatasan. Karen sebagai suku yang beragama Buddha dan Kristen yang memperjuangkan otonomi selama 60 tahun menghuni pegunungan dekat perbatasan Thailand. Shan sebagai etnis Buddha yang berkerabat dengan etnis Thai. Rakhine (Arakan) penganut Buddha yang tinggal di perbukitan di Myanmar Barat. Kachin kebanyakan Kristen yang juga tersebar di Tiongkok dan India. Chin kebanyakan Kristen menghuni kawasan dekat India. Mon etnis Budha yang menghuni kawasan selatan dekat perbatasan Thailand. Rohingya etnis muslim minoritas yang tinggal di utara Rakhine dekat Bangladesh.<sup>19</sup> Nasib Rohingya semakin merana karena diperdagangkan cukong di Thailand Selatan dengan ditemukannya 134 orang di kebun karet, 38 warga Bangladesh dan 15

---

<sup>18</sup> *Suara Merdeka*, 23 September 2014.

<sup>19</sup> *Kompas*, 19 Oktober 2014.

warga Rohingya.<sup>20</sup> Muslim Rohingya melarikan diri atau meninggalkan Rakhine sebanyak 10.000 orang menumpang perahu pada pertengahan Oktober 2014 karena terisolasi. Data Arakan Project (kelompok pembela HAM Rohingya) sebanyak 900 warga Rakhine mengungsi melalui jalur laut meski dengan perahu tidak layak karena otoritas Myanmar makin represif yang tidak akan memberikan status kewarganegaraan. Sehingga tidak ada gunanya hidup di Rakhine Myanmar.<sup>21</sup> Pulau Langkawi Malaysia sebagai tempat mendarat 1.107 pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh. Mereka ditempatkan di Pusat Detensi Imigran Belantik, negara bagian Kedah. Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh melalui tiga gelombang. Warga muslim Rohingya tak dapat memilih dalam referendum perubahan konstitusi Myanmar pada Mei 2015 setelah Presiden Thein Sein mencabut hak suara mereka pada Rabu 11 Februari 2015. Pencabutan akibat demo warga Myanmar agar Rohingya sebagai penduduk pemegang 'dokumen putih' (bukan warga negara) tidak memilih.

Data PBB, ada satu juta warga Rohingya hidup di kamp pengungsi Myanmar. Pada 2012 muslim Rohingya berkonflik dengan Buddha di Provinsi Rakhine menyebabkan lebih dari 200 orang Rohingya tewas.<sup>22</sup> Di sisi lain, beban pemerintah Myanmar menghadapi pemberontak di wilayah Kayin, Kachin, Shan, dan Chin. Di wilayah ini, kelompok bersenjata seperti tentara pembebasan Kachin, Shan army, dan tentara pembebasan Arakan ingin menuntut kemerdekaan dari Myanmar. Uskup Agung Afrika Selatan Desmond Tutu, peraih Nobel Perdamaian, mendesak dunia internasional membantu Rohingya. Sebaliknya, nasionalis Yangon memprotes tekanan asing terhadap Myanmar yang ingin membantu Rohingya. Nasionalis itu berkeyakinan bahwa Rohingya adalah Bengali yang tinggal di Myanmar secara ilegal.<sup>23</sup> Sekitar 300.000 kartu putih (tanda penduduk Myanmar dan sebagai syarat memilih dalam pemilu) diminta oleh pemerintah Myanmar dan dinyatakan tak berlaku sejak 31 Maret 2015. Warga Rohingya diperkirakan 1,5 juta jiwa berdomisili di dekat perbatasan antara Myanmar dan Banglades. Sekjen PBB Ban Ki-Moon, Jumat 24 April 2015 mendesak Myanmar

---

<sup>20</sup> *Suara Merdeka*, 15 Oktober 2014.

<sup>21</sup> *Kompas*, 28 Oktober 2014.

<sup>22</sup> *Suara Merdeka*, 13 Februari 2015.

<sup>23</sup> *Kompas*, 27 Mei 2015.

untuk memberikan status kewarganegaraan kepada warga muslim Rohingya yang jumlahnya 140 ribu (dari 1,1 juta warga Rakhine) yang bermukim darurat di bagian barat negara bagian Rakhine Myanmar. Terlunta-luntanya Rohingya imbas konflik dengan umat Buddhis di Rakhine tahun 2012. Desakan Sekjen PBB menjelang pemilu akhir 2015 karena khawatir tidak diberi hak memilih. Nasib tragis Rohingya sejak di tanah kelahirannya sendiri, yakni di negara bagian Rakhine (dulu dikenal Arakan, Myanmar) hingga melarikan diri ke Indonesia, Malaysia, dan Thailand.<sup>24</sup>

Warga Rohingya terkatung-katung di kamp pengungsi Cox Bazar yakni di wilayah perbatasan antara Banglades dan Myanmar untuk dipindah ke Pulau Thenger Char. Menlu Bangladesh Minggu 5 Februari 2017 mendesak masyarakat internasional untuk mendukung rencana itu agar pengungsi mudah mendapat akses pada bantuan kemanusiaan. Terdapat 232.000 warga Rohingya mengungsi ke Banglades karena menghindari operasi keamanan di wilayah Maungdaw, Myanmar.<sup>25</sup> Komisi Tinggi PBB untuk urusan pengungsi, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) memastikan bahwa imigran Rohingya yang terdampar di Aceh Utara merupakan pencari suaka. UNHCR telah meregistrasi untuk memastikan identitas, asal negara, dan alasan pergi dari negara asal, terdapat 332 imigran asal Myanmar dan 252 asal Banglades. Hasil registrasi, imigran asal Banglades untuk mencari pekerjaan. Dubes Banglades untuk Indonesia MD Nazmul Quanine menyatakan akan memulangkan imigran Bangladesh ke Banglades. Pemerintah Myanmar cenderung melempar tanggung jawab pada mitra regional.<sup>26</sup> Menlu AS Antony J Blinken menyatakan, pemerintah Negara kawasan Asia Tenggara terutama Myanmar didesak segera menangani krisis terkait gelombang pengungsi manusia perahu asal Myanmar dan Banglades. Menurut Blinken, akibat tekanan yang dialami etnis minoritas Rohingya, mereka mencoba mencari penghidupan lebih baik di luar Myanmar, walaupun besar resikonya. Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah bertemu dengan perwakilan UNHCR Thomas Vergas, Indonesia bersedia menampung pengungsi asal Rohingya selama setahun karena pertimbangan kemanusiaan. Pemerintah

---

<sup>24</sup> *Suara Merdeka*, 26 April 2015.

<sup>25</sup> *Kompas*, Selasa 7 Februari 2017.

<sup>26</sup> *Kompas*, 19 Mei 2015.

Myanmar pun menyatakan siap memberikan bantuan kemanusiaan kepada manusia perahu dari etnis Rohingya. Selama ini pemerintah Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai warga illegal asal Banglades dengan memberi julukan Benggala. Malaysia dan Indonesia sepakat mengambil sikap menampung sementara pengungsi Rohingya dan mengusir kapal pengungsi setelah kedua Menlunya bertemu di Putrajaya Malaysia, Rabu 20 Mei 2015. Thailand juga membantu penanganan pengungsi Rohingya.<sup>27</sup> Myanmar mengklaim sebagian besar imigran yang mendarat di Malaysia dan Indonesia pada bulan Mei 2015 bukan warga Rohingya melainkan pelarian dari Banglades. Pernyataan ini setelah Amerika mengecam Myanmar atas kegagalannya mengatasi masalah Rohingya. Klaim Myanmar tersebut dibantah Wamenlu AS Antony Blinken yang mengunjungi Yangon Kamis dan Jumat 21-22 Mei 2015 bahwa sebagian besar imigran adalah warga Rohingya. Krisis imigran Asia Tenggara muncul setelah operasi perdagangan manusia yang dilakukan Thailand membuat pelaku perdagangan manusia meninggalkan kapal yang dipenuhi imigran di Teluk Bengal dan Laut Andaman. UNHCR memperkirakan ada 3.500 imigran yang masih terdampar di tengah laut tanpa pasokan makanan yang memadai.<sup>28</sup> Pejabat berwenang Myanmar mengatakan, 727 imigran illegal yang ditemukan Angkatan Laut Myanmar dikembalikan ke Negara Bagian Rakhine. Orang itu dianggap bukan warga Rohingya tapi imigran dengan motif ekonomi asal Banglades. Pada Jumat 29 Mei 2015 di area Delta Irrawaddy ditemukan 50 orang tewas. Terdapat 3.500 orang mengungsi di Thailand, Malaysia, dan Indonesia, sedangkan 2.500 diduga masih terapung di tengah laut.<sup>29</sup>

#### **4. Upaya Represif Pemerintahan Myanmar terhadap Rohingya**

Rakhine merupakan wilayah miskin dan mudah tersulut ketegangan. Hampir semua warga Rohingya tinggal di kamp pengungsian setelah kerusuhan mematikan pada 2012. Polisi Myanmar menangkap 93 orang yang terlibat dalam rantai perdagangan manusia, meski tak satu pun melibatkan warga Rakhine. Korban warga Myanmar di negara bagian Shan (Myanmar bagian timur) yang berbatasan langsung dengan Thailand, Laos, dan

---

<sup>27</sup> *Suara Merdeka* dan *Kompas*, 21 Mei 2015.

<sup>28</sup> *Suara Merdeka*, 23 Mei 2015.

<sup>29</sup> *Suara Merdeka*, 1 Juni 2015.

Tiongkok, juga di Mandalay dan Yangon (dua kota besar di Myanmar). Sebanyak 19 imigran asal Banglades yang ditampung di bekas Kantor Imigrasi Kelas II Lhok Seumawe Aceh dipulangkan ke Banglades.<sup>30</sup> Tiga polisi Myanmar dijatuhi hukuman tahanan selama dua bulan akibat terbukti menyiksa warga sipil Rohingya ketika operasi. Penyiksaan dilakukan di Negara Bagian Rakhine.<sup>31</sup>

Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi tahun 2016 membentuk Komisi Khusus Penyelidik Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap warga Rohingya (muslim). Komisi terdiri 9 anggota menunjuk Kofi Annan sebagai pemimpinya. Komisi meminta pelaku pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya mempertanggungjawabkan pada operasi militer Oktober 2016 yang menyebabkan 87 Rohingya melarikan diri ke Banglades, ada pula yang dibunuh, dan diperkosa. Pada 12 Agustus 2017 pasukan militer Myanmar melakukan lagi operasi pembersihan sehingga 3.500 etnis Rohingya yang melarikan diri dengan perahu ke penampungan di Cox's Bazaar Banglades. Etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar bukan warga negaranya tapi imigran Banglades sehingga dikategorikan sebagai warga Negara tak berkewarganegaraan (*stateless*) terbesar di dunia yang mencapai 1,1 juta jiwa. Padahal mereka lahir dan besar di Myanmar. Komisi menyarankan proses verifikasi kewarganegaraan dipercepat dan perubahan undang-undang yang memungkinkan etnis Rohingya menjadi penduduk Myanmar dengan proses naturalisasi. Komisi juga menyarankan pembangunan infrastruktur di wilayah Rakhine yang dikategorikan wilayah termiskin di Myanmar.<sup>32</sup>

Kerusuhan yang diderita etnis Rohingya di Myanmar sejak sebelum 2012. Hal ini akibat pemerintah Myanmar tidak mengakui bahwa Rohingya sebagai warga negaranya tetapi dianggap sebagai imigran karena ancaman identitas. Pada 3 Juni 2012 kerusuhan sektarian pecah di Rakhine, Myanmar Barat. Maret 2013 bentrokan antara Rohingya dengan warga di Rakhine, lebih dari 70 orang meninggal, 3.000 bangunan rusak, dan 60.000 orang kehilangan tempat tinggal, dan warga Rohingya mengungsi ke luar Myanmar. Pada November 2014 PBB mendesak pemerintah Myanmar

---

<sup>30</sup> *Kompas*, 9 Juni 2015.

<sup>31</sup> *Kompas*, Kamis, 9 Februari 2017.

<sup>32</sup> *Jawa Pos*, Jumat 25 Agustus 2017.

memberikan status kewarganegaraan bagi etnis minoritas Rohingya. Maret 2016 partai pimpinan Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi, resmi berkuasa di Myanmar. Militer masih menguasai 25 persen kursi di parlemen. Pada 9 Oktober 2016 serangan bersenjata terhadap pos polisi Myanmar oleh kelompok militan Rohingya di perbatasan Myanmar Banglades, 9 orang tewas. Pada Desember 2016 operasi militer dilakukan setelah peristiwa 9 Oktober 2016, ratusan warga Rohingya tewas. 4 Januari 2017 komisi penyelidik kekerasan di Rakhine membantah bahwa pasukan keamanan telah melakukan kekerasan dan melecehkan warga Rohingya. 22 Juni 2017 pasukan keamanan Myanmar menembak tiga milisi pasukan penyelamat Rohingya Arakan (ARSA). ARSA dituding menyerang penduduk dan pemimpin lokal. Pada 31 Agustus 2017 sekitar 400 orang dari berbagai pihak tewas dalam kerusuhan di Rakhine. Puluhan ribu warga Rohingya melarikan diri ke Banglades tapi ditolak karena sudah menampung lebih dari 400.000 pengungsi di kamp pengungsian.<sup>33</sup>

Warga etnis Rohingya yang keluar dari Negara Bagian Rakhine Myanmar menyeberang ke Banglades untuk mengungsi ada 100.000 orang. Ranjau darat dan tembakan polisi Myanmar menghadangnya. Mereka membayar para penyelundup 10.000 kyat Myanmar (sekitar Rp 98.500 atau 7,4 dollar AS) per orang untuk menyeberangi Sungai Naf, perbatasan wilayah Myanmar dan Banglades dengan perahu kayu yang ditumpangi 40 orang. Para penyeberang pada awal September 2017 oleh Otoritas Banglades Selasa 5 September 2017 menemukan 53 jenazah karena perahu yang ditumpangi penyeberang tenggelam. Ada pula pengungsi yang kehilangan salah satu kakinya karena ledakan ranjau setelah sampai di wilayah Shamiapur Banglades. Ada pula pengungsi yang tertembak oleh peluru pasukan penjaga perbatasan. PBB memprediksi, pengungsi sejak 25 Agustus 2017 berjumlah 123.600 orang sehingga jumlah warga Rohingya di Banglades hingga awal September 2017 diperkirakan berjumlah 210.000 orang, termasuk pengungsi sejak Oktober 2016. Gelombang eksodus pengungsi Rohingya sejak 25 Agustus 2017 saat kelompok militan di Rakhine menyerang pos-pos polisi dan militer Myanmar. Serangan militan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) Jumat 29 Agustus 2017 menyebabkan 12 polisi Myanmar tewas dan puluhan tentara ARSA. Serangan ARSA

---

<sup>33</sup> *Kompas*, Sabtu 2 September 2017.

dengan alasan melindungi minoritas muslim Rohingya dari penindasan di Myanmar. Di sisi lain, sebagai upaya agar nasibnya didengar dunia. Atas serangan itu dibalas oleh militer Myanmar.<sup>34</sup>

Sabtu 26 Agustus 2017 warga Rohingya yang mencoba melewati perbatasan di negara timur Myanmar menuju Banglades melalui perbatasan di wilayah Ghumdhum tertangkap dan ada pula yang ditembak Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA). Mereka memohon agar tidak dikembalikan ke Myanmar (negara bagian Rakhine) karena tidak mendapat kepastian hidup yang aman. Upaya ke Banglades pun tidak dikabulkan karena tidak resmi dan tanpa izin. Ada 20 warga Rohingya yang sudah masuk wilayah Banglades melalui Sungai Naf (perbatasan antara Myanmar dan Banglades) oleh penjaga perbatasan Banglades mereka dikembalikan ke Myanmar.<sup>35</sup> Tentara Myanmar Senin 28 Agustus 2017 mengintensifkan operasi militer untuk mencari kelompok militan di wilayah perbatasan Myanmar-Banglades. Operasi dilakukan menyusul penyerangan 30 pos polisi dan 1 pos tentara perbatasan yang menewaskan 104 orang. Komunitas HAM internasional mengkritisi Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian dinilai kurang peduli dengan isu Rakhine.<sup>36</sup>

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menjadi sasaran kecaman karena dalam pidatonya Selasa 19 September 2017 di Naypitaw, ibu kota Myanmar, tak menanggapi tuduhan PBB terkait upaya pembersihan etnis yang dilakukan militer Myanmar terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya. Suu Kyi hanya mengancam pelanggaran HAM di Rakhine dan mengancam akan menghukum semua pelaku apa pun agama, ras, maupun posisi politiknya yang terbukti melanggar hukum dan HAM. Suu Kyi dianggap menutup mata atas tragedi di negara bagian Rakhine. Di sisi lain, Amnesti Internasional mengklaim memiliki banyak bukti keterlibatan militer Myanmar dalam upaya pembersihan etnis.<sup>37</sup>

## 5. Upaya Pemerintah Indonesia Menyikapi Rohingya

---

<sup>34</sup> *Kompas*, Rabu, 6 September 2017.

<sup>35</sup> *Kompas*, Senin, 28 Agustus 2017.

<sup>36</sup> *Kompas*, Selasa 29 Agustus 2017, hlm 8.

<sup>37</sup> *Suara Merdeka*, Rabu 20 September 2017.

Pemerintah RI dalam berupaya mengatasi persoalan yang diderita etnis Rohingya di Myanmar berupa pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi Rohingya dan upaya diplomatik.

*Pertama*, pemerintah RI menyiapkan dua langkah untuk menangani para pengungsi. Rapat yang dipimpin Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa (saat itu) Minggu 24 Mei 2015. Rapat dihadiri Pemda Aceh, UNHCR, Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Rapat menghasilkan pertama, 720 pengungsi asal Bangladesh dikembalikan ke negaranya karena pengungsi pencari kerja dengan biaya UNHCR dan IOM. Kedua, pemberian perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, *trauma healing* (penanganan trauma) oleh kementerian RI. Dari 1.759 pengungsi di Aceh, 720 asal Bangladesh, 1.062 jiwa pengungsi Rohingya terdiri 565 lelaki, 235 perempuan, dan 225 anak-anak. Menurut Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, ada tiga opsi dalam menangani pengungsi (1) diintegrasikan dengan penduduk setempat, artinya bisa menjadi warga Indonesia bila pemerintah menerima, meski Indonesia tidak menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951 sehingga tidak ada kewajiban menerima, (2) dipulangkan ke negara asal, dan (3) dimukimkan di negara anggota Konvensi Pengungsi atau negara non-peserta konvensi yang mau menerimanya. Australia merupakan Negara anggota konvensi, sedangkan Gambia bersedia menerima pengungsi.<sup>38</sup> Australia menolak menampung pengungsi. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menyatakan, tak ingin terkesan mendukung dan menyemangati pengungsi untuk datang ke Australia menumpang perahu dan berharap mendapat program penempatan kembali secara istimewa.<sup>39</sup> PM Australia Tony Abbott tidak membantah dugaan bahwa petugas Australia membayar penyelundup pengungsi yang berniat memasuki perairan negaranya agar mengarahkan kapalnya kembali ke Indonesia dan tidak jadi masuk ke Australia dengan membayar 40.000 dollar Australia (Rp 420 juta). Australia akan melakukan segala cara untuk menghentikan perahu pengungsi.<sup>40</sup> Belum diupayakan pemerintah RI atas kesediaan

---

<sup>38</sup> *Suara Merdeka*, 25 Mei 2015.

<sup>39</sup> *Kompas*, 24 Mei 2015.

<sup>40</sup> *Suara Merdeka*, 13 Juni 2015.

Gambia menerima pengungsi. Hal ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan UNHCR.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI mendapatkan tugas dari Wapres Jusuf Kalla (saat itu) untuk membantu pemenuhan kebutuhan pengungsi Rohingya dan Banglades di Aceh berjumlah 1.722 jiwa, terdiri 1.239 laki-laki, 244 jiwa perempuan, 238 anak-anak. Mereka terdampar secara bergelombang pada tanggal 10, 15, 16, dan 20 Mei 2015. Pengungsi ditempatkan di Kabupaten Aceh Utara 560 jiwa, di Kabupaten Aceh Tamiang 47 jiwa, Kota Langsa 682 jiwa, Kabupaten Aceh Timur 433 jiwa. Langkah awal BNPB adalah mendistribusikan bantuan logistik berupa WC *portable*, dapur umum, alas tidur, dsb.<sup>41</sup> Kebutuhan logistik pengungsi Rohingya yang ditampung di wilayah Aceh meliputi Kuala Langsa, Bayeun, Kuala Cangkoy, dan Tamiang untuk sementara tercukupi berupa 250 tenda keluarga untuk hunian sementara.<sup>42</sup> PT Ashibu sebagai Badan Otonom (Banom) NU yang dibentuk oleh Asosiasi Bina Haji dan Umrah NU yang menangani haji dan umrah mengunjungi pengungsi Rohingya dan memberi bantuan materi dan dukungan moral.<sup>43</sup> Penulis tidak mendapatkan data kelanjutan dari kunjungan ini.

Indonesia membangun dua sekolah di Desa La Ma Chae dan Thet Kay Pyia di negara bagian Rakhine, Myanmar yang diresmikan Sabtu 21 Januari 2017 oleh Menlu RI Retno Marsudi. Peresmian dihadiri oleh pejabat Myanmar yakni Menteri Sosial dan Kesejahteraan, Pejabat Kementerian Pendidikan dan perwakilan beberapa organisasi kemanusiaan Indonesia. Dana pembangunan bersumber dari hasil sumbangan kemanusiaan masyarakat Indonesia yang dikoordinir oleh PKPU, salah satu anggota Aliansi Lembaga Kemanusiaan Indonesia (ALKI). Lembaga pendidikan ini diharapkan terfasilitasinya pendidikan formal, belajar keberagaman, dan tumbuhnya toleransi dan pluralisme.<sup>44</sup>

Menlu RI Retno LP Marsudi Minggu 3 September 2017 menyatakan, Indonesia bersama 11 LSM dari sejumlah ormas seperti

---

<sup>41</sup> *Suara Merdeka*, 24 Mei 2015.

<sup>42</sup> *Kompas*, 27 Mei 2015.

<sup>43</sup> *Suara Merdeka*, 8 Juni 2015.

<sup>44</sup> *Merdeka.com*, 23 Januari 2017.

NU, Muhammadiyah, dan Walubi membantu warga Rakhine di sejumlah pengungsian dengan membagi makanan dan pakaian untuk pengungsi dan membangun dua sekolah di dua komunitas warga Rakhine. Program bantuan diluncurkan oleh Menlu RI Kamis 31 Agustus 2017 bernama *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) untuk Myanmar selama dua tahun. Program dioperasikan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) sebagai wujud kerja sama dan komitmen 11 lembaga kemanusiaan dari berbagai komunitas di Indonesia, masyarakat, dan Kemenlu RI. Tujuan utama HASCO adalah mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar warga Rakhine, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kebutuhan lain serta meningkatkan kapasitas publik dan pemulihan. Sasaran programnya semua warga Rakhine, khususnya warga Buddha dan muslim dengan pendekatan inklusif. Inklusif dengan harapan dapat membantu penyelesaian persoalan di wilayah yang mengalami eskalasi konflik. Model inklusif merupakan rekomendasi Badan Independen Komisi Penasehat atas Negara Bagian Rakhine (Advisory Commission on Rakhine State) yang dipimpin mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Pelaksanaan HASCO kerja sama antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat lokal di Rakhine. Pada Januari 2017 tim AKIM berkunjung ke Sittwe memberikan bantuan awal.

Kerja sama antara Human Concern International (HCI) dengan Rumah Zakat membangun sekolah darurat di Bokhar Para Village, Kota Sittwe, Rakhine State. Pada pertengahan Desember 2017 digunakan proses pembelajaran untuk bidang ilmu pengetahuan umum, bahasa asing, dan ilmu agama dengan dua pengajar warga setempat pada 40-50 anak Rohingya tiap hari Sabtu hingga Kamis. Presidium Medical Rescue Commite (MER-C) dr. Sarbini Abdul Murad berharap adanya pembangunan Rumah Sakit Indonesia (RSI) di wilayah Muaung Bwe, Mrauk U, Provinsi Rakhine, Myanmar bila rumah sakit jadi sebagai simbol perdamaian. Rumah sakit dibangun oleh MER-C, Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan TNI. Pada Agustus 2017 fase pengurukan lahan, direncanakan pada Oktober 2017 dibuat rumah untuk dokter dan paramedis, pada pertengahan 2018 diperkirakan beroperasi.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Republika.online*, Minggu 27 Agustus 2017.

Selain membangun sarana sekolah dan rumah sakit, donasi peduli Rohingya difasilitasi penyalurannya ke rekening Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank CIMB Niaga, dan Bank BCA atas nama Yayasan Infaq Dakwah Center. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menginisiasi penggalangan dana melalui laman *kitabisa.com* atau secara langsung melalui kelurahan di Bandung. Hingga Jumat 8 September 2017 terkumpul donasi sebanyak Rp 2,2 miliar bila digabung yang dari kelurahan menjadi Rp 3 miliar. Bantuan Aksi Cepat Tanggap (ACT) membawa 1.000 paket bantuan dari Indonesia siap dibawa dengan lima truk ke kamp Kanzarpara, Banglades. Setiap paket bantuan berisi beras, minyak, *dhall* (makanan pokok Banglades), tepung, air mineral, pakaian, perlengkapan sanitasi, terpal, dan alas tidur.<sup>46</sup>

Respon positif datang pula dari anggota DPR RI. Ketua Komisi I DPR FPKS Abdul Kharis Almasyari mengutuk kejahatan kemanusiaan atas warga muslim Rohingya di Myanmar. Hal yang seharusnya dilakukan Indonesia, pertama, menginvestigasi kritis pembantaian sistematis/genosida pemerintah Myanmar. Kharis mengapresiasi para nelayan Aceh yang kerap memandu para pengungsi ke pantai. Kedua, mendorong gagasan pendirian sebuah institusi atas mekanisme pendanaan global untuk pengungsi Rohingya diikuti upaya untuk menyelesaikan akar krisis Rohingya. Ketiga, dalam jangka menengah dan panjang, bersama Malaysia mengupayakan diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap Rohingya.<sup>47</sup>

Bantuan Teknis Indonesia pada Rohingya antara lain<sup>48</sup>

Waktu	Upaya Taktis
3/2/2009	Membantu bahan makanan dan penampungan sementara bagi 198 pengungsi Rohingya di Aceh
26/2/2013	Menampung 121 pengungsi Rohingya di Lhoksumawe dan 63 di Aceh Timur
8/12/2014	Pembangunan 4 sekolah senilai 1 juta dollar AS di Rakhine
19/5/2015	Bersama UNHCR dan IOM menyediakan

<sup>46</sup> *Kompas*, Sabtu 9 September 2017.

<sup>47</sup> *Republika.online*, Selasa 29 Agustus 2017.

<sup>48</sup> *Kompas*, Selasa 5 September 2017.

	penampungan, pangan, dan obat bagi 1.345 warga Rohingya
29/12/2016	Presiden Jokowi mengirim bantuan 115 ton (10 kontainer) terdiri tepung, makanan cepat saji, selimut, dan sarung untuk warga Rohingya

*Kedua*, upaya diplomasi pemerintah RI. Untuk mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang adiluhung, pemerintah RI juga melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar. Presiden Jokowi memerintahkan Menlu RI berkomunikasi dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Ketua Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine, Kofi Anan (mantan Sekjen PBB). Senin 4 September 2017 Menlu RI bertemu dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Seniou U Min Aung Hlaing, Menteri pada Kantor Presiden, Penasehat Keamanan Nasional Myanmar, Menteri Muda Urusan Luar Negeri, Menlu, dan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi di Naypyidaw Myanmar, pertemuan secara terpisah. Menlu RI setelahnya melanjutkan pertemuan tersebut terbang ke Banglades Selasa 5 September 2017. Menlu RI kepada Suu Kyi menyampaikan amanat masyarakat Indonesia dan empat usulan solusi (Formula 4+1) bagi masa depan warga Rohingya yakni mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Disepakati bahwa Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar yang melibatkan Komisi Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa pihak, termasuk Indonesia dan ASEAN. Menlu RI menginformasikan pada Suu Kyi bahwa adanya peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) pada 31 Agustus 2017 yang terdiri 11 organisasi kemanusiaan. Prioritas pada empat hal, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan. Aliansi membantu senilai 2 juta dollar AS. Dua hal yang dicapai misi Menlu RI adalah tersampainya perhatian masyarakat Indonesia atas situasi kemanusiaan di Rakhine dan adanya komitmen otoritas Myanmar untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan, Indonesia mendapatkan akses dalam mekanisme penyaluran bantuan

kemanusiaan yang dipimpin oleh pemerintah Myanmar bersama ICRC.<sup>49</sup>

Indonesia ikut berperan dalam meredakan konflik yang terjadi di Myanmar dengan mengutus Menteri Luar Negerinya menemui Aung Sang Suu Kyi. Indonesia akhirnya berhasil membuka akses bantuan bagi warga Rohingya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi duduk bersama dengan pemimpin de facto Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, Senin 04 September 2017 di ibu kota Myanmar, Naypyidaw untuk membicarakan peran Indonesia dalam meredakan kekerasan di Myanmar. Lawatan Menteri Luar Negeri Indonesia ini memang menjadi sorotan dunia, sebab menjadi bentuk respons pertama di mana wakil pemimpin negara turun langsung membahas isu kemanusiaan yang terjadi di negara bagian Rakhine. Retno LP Marsudi juga menemui Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal U Min Aung Hlaing dan tiga menteri yang menduduki jabatan strategis di Myanmar. Presiden Joko Widodo, Jumat 01 September 2017 menyebutkan Indonesia perlu melakukan upaya nyata untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Selain memberikan bantuan obat-obatan dan makanan, membantu membangun sebuah rumah sakit di Myauk U, Rakhine yang selesai dibangun Oktober 2017. Pemerintah RI berkomitmen terus membantu krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional. Presiden Jokowi mendengarkan usulan yang disebut Formula 4+1 untuk Rakhine State yang disampaikan menteri luar negeri, Myanmar pun berjanji untuk membuka akses bagi Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM), 11 lembaga swadaya masyarakat yang berfokus memberi bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Bentrokan di Rakhine tak surut yang dipicu oleh serangan militan Rohingya ke pos keamanan Myanmar menyebabkan 400 orang tewas dari kedua belah pihak. Kalkulasi terbaru yang dilakukan PBB di perbatasan Bangladesh, Cox Bazar memperkirakan 150.000 orang telah mengungsi sejak Oktober ke negara tetangga, Bangladesh. Menlu RI Retno Marsudi bertolak ke Dhaka, Bangladesh Selasa 05 September 2017 untuk membahas bantuan kemanusiaan bagi

---

<sup>49</sup> *Kompas*, Selasa, 5 September 2017.

pengungsi Rohingya sekaligus mendesak pemerintah Bangladesh agar melindungi para pengungsi yang berada di perbatasan. Selama ini, Bangladesh menutup perbatasannya karena merasa kesulitan menampung lebih banyak lagi pengungsi yakni 400.000 warga Rohingya berlindung di tempat pengungsian di Bangladesh sejak ketegangan di Rakhine terjadi tahun 1990-an. Menlu RI berkunjung ke Banglades bertemu mitra dengan Menlu Banglades Abu Hassan Mahmood Ali dan PM Sheikh Hasina, bertemu dengan perwakilan Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) di Banglades Tayba Sharid dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Banglades Peppi K Siddiq. Menlu RI menyatakan, Indonesia siap berbagi beban dengan Banglades dan disambut baik tawaran Indonesia. Indonesia pun mendapat dukungan dari Belanda, Iran, Inggris, dan Negara ASEAN melalui menlu masing-masing. Wapres JK Selasa 5 September 2017 menyatakan, Indonesia akan melobi para kepala Negara melalui Konferensi Tingkat Tinggi OKI dan Sidang Umum PBB untuk membantu penyelesaian Rakhine.<sup>50</sup> Pemerintah Banglades membuat kamp baru di lahan sekitar 2.000 ha di dekat fasilitas PBB untuk menampung 250.000-300.000 pengungsi. Bila tidak difasilitasi lahan baru, dikhawatirkan para pengungsi masuk ke Banglades menimbulkan persoalan baru. Di sisi lain, Myanmar enggan menarik pengungsi Rohingya. Selain itu, 27.000 pengungsi dari komunitas Buddha dan Hindu meninggalkan Maungdaw, daerah yang dilanda kekerasan di Rakhine, sebagian mengungsi ke arah Sittwe.<sup>51</sup> Di tengah upaya diplomasi, Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta 7 September 2017 dilempar bom pada dini hari. Akibatnya, pemerintah Myanmar melontarkan protes pada pemerintah RI . Selasa 5 September 2017 di Jakarta sekitar 3.000 anggota Ormas Islam berunjuk rasa di depan kedubes Myanmar agar Myanmar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Rohingya di Rakhine. Aksi protes terhadap kekerasan yang dialami kelompok minoritas Rohingya juga disuarakan di depan kedutaan Myanmar di Jakarta. Demonstrasi yang diusung oleh "Sahabat Muslim Rohingya" mendapat penjagaan yang lebih ketat oleh polisi menyusul insiden pelemparan bom molotov yang terjadi pada Minggu 3 September 2017. Demonstrasi mendesak pemerintah agar mengambil langkah

---

<sup>50</sup> *Kompas*, Rabu, 6 September 2017.

<sup>51</sup> *Kompas*, Minggu, 10 September 2017.

tegas dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Myanmar. Menlu Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi memilih jalur diplomasi dengan satu tujuan dan fokus utama bantuan kemanusiaan.

Kepala Dewan HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein Senin 11 September 2017 mengecam Myanmar karena kekejaman operasi militer dengan pembersihan etnis oleh tentara Myanmar di Maungdaw dinilai sebagai serangan sistematis terhadap warga etnis Rohingya. Hingga 11 September 2017, ada 313.000 warga Rakhine mengungsi ke Cox's Bazar, Banglades. Banyak di antara pengungsi menunggu untuk menyeberang ke Banglades. Hal ini dimanfaatkan pemilik perahu untuk menarik ongkos menyeberang 10.000 taka atau 122 dollar AS per orang guna menyeberangkan ke Banglades.<sup>52</sup>

Presiden Jokowi Selasa 12 September 2017 melepas bantuan kemanusiaan Indonesia untuk korban kekerasan di Rakhine melalui Banglades. Bantuan diangkut dengan pesawat Hercules kelas C-130 milik TNI Angkatan Udara dari Pangkalan Halim Perdana Kusuma Jakarta singgah di Aceh dan selanjutnya melalui Kota Chittagong Banglades. Bantuan itu melalui Banglades karena keberadaan pengungsi berada di Cox's Bazar dan Kutupalong, perbatasan antara Banglades dengan Myanmar. Barang/bantuan yang dikirim disesuaikan kebutuhan pengungsi berupa beras, selimut, pakaian, perlengkapan mandi, dan baju anak-anak.<sup>53</sup> Selain bantuan tersebut, bantuan dalam bentuk diplomasi.

<b>Waktu</b>	<b>Diplomasi Indonesia</b>
4/8/2012	Bekerja sama dengan PBB dan lembaga internasional lain mengatasi masalah pengungsi Rohingya agar mendapat status kewarganegaraan
29/9/2015	Membahas dengan Malaysia, UNHCR, dan IOM hal pengungsi Rohingya
6/12/2016	Aung San mengundang Menlu RI Retno membahas penyelesaian Rohingya
8/12/2016	Presiden Jokowi bertemu Ketua Komisi Penasehat Khusus untuk Rakhine (Kofi Annan) membicarakan penyelesaian Rohingya di Bali

<sup>52</sup> *Kompas*, Selasa, 12 September 2017

<sup>53</sup> *Kompas*, Rabu, 13 September 2017

19/12/2016	Menlu Retno dan Aung San bertemu dalam Konferensi Menlu ASEAN di Yangon Myanmar menyoroti Rohingya
20/12/2016	Menlu Retno menemui Menlu Baglades membahas isu bilateral pentingnya hubungan Myanmar-Baglades
29/4/2017	Presiden Jokowi bertemu Aung San di Filipina membahas stabilitas keamanan di Rahine
25/8/2017	Pascapenyerangan pos keamanan di Maungtauw Myanmar, Menlu RI menghubungi otoritas Myanmar, Baglades, dan Kofii Annan untuk mendorong keamanan di Rakhine
25/8/2017	Menlu RI menemui Aung San dan pejabat Myanmar lainnya perihal Rohingya

## 6. Mengurai Akar Konflik Rohingya

Menurut Panuju, pemberitaan media mengerucut pada tiga pihak yang dianggap biang keladi konflik. Pertama, junta militer yang belum sepenuhnya menerima Suu Kyi sebagai pemimpin Myanmar, meski Suu Kyi berhasil dalam pemilu tahun 2015 dan partainya (Liga Nasional untuk Demokrasi/LND) berhasil mengalahkan junta militer. Persoalannya, konstitusi yang dibuat Junta Militer Myanmar melarang perempuan menjadi pemimpin. Kedua, Biksu Wiratu, pemimpin kelompok kontroversi 969 yang pernyataannya menyebarkan kebencian terhadap muslim di Myanmar. Ketiga, tahun 1991 Suu Kyi menerima Hadiah Nobel Perdamaian atas perjuangannya memajukan demokrasi dan HAM tatkala ditindas Junta Militer Myanmar, tetapi tatkala Suu Kyi berkuasa tetap terjadi konflik. Ketiga hal itu memunculkan generalisasi bahwa militer kejam, biksu membenci muslim, dan perempuan cenderung lemah dan tak berdaya. Emilie Biver dalam tesisnya 2014 tentang *Ajaran Buddha dan Narasi Anti-Islam* menyatakan bahwa narasi anti-Rohingya yang muslim di Myanmar bukan berasal dari ajaran Buddha tetapi dari elit agama dan politik yang menggunakan simbol agama untuk mendapat legitimasi dan menjustifikasi narasi dan tindakan kebecian. Salah satunya dengan menggunakan angka cantik '969' yang mudah diingat sebagai simbol pergerakan dimotori Biksu Ashin Wirathu.

Angka 969 menjadi nama pergerakan untuk mendorong warga memboikot bisnis orang Rohingya.<sup>54</sup>

Menurut Oegroseno, akar masalah pengungsi Rohingya adalah konflik antara etnis muslim Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine sejak 1942. Puncaknya adalah konflik pada 2012 dengan korban 192 orang meninggal dunia, 265 orang cedera, 8.614 bangunan hancur, 32 masjid dan 22 wihara/biara dibakar, dan 100.000 orang mengungsi. Bila akar masalah ini tidak diselesaikan, penerapan hukum internasional hanyalah debat akademik, tak memberikan penyelesaian permanen dan kita tidak bisa berharap pengungsi Rohingya tak akan mendarat lagi di perairan Indonesia. Berbekal pengalaman Indonesia berupa (1) sebagai mediator konflik yang rumit, seperti inovasi Indonesia dalam penyelenggaraan Coctail Party dan Jakarta Informal Meeting pada 1980-an yang berhasil menyelesaikan konflik Indochina dan menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Begitu pula mediator antara pemerintah Filipina dengan MNLF dalam meredam konflik di Mindanao, (2) berpengalaman menerima mediator asing dalam penyelesaian konflik dalam negeri di Aceh yang berlangsung 10 tahun. Model penyelesaian Aceh dijadikan rujukan dunia, (3) mengelola konflik bilateral yang sensitif, seperti membangun kembali hubungan dengan Timur Leste pascakemerdekaan Timor Leste dari Timor-Timur, (4) mengelola dan menyelesaikan pengungsi Vietnam yang jumlahnya hampir seperempat juta orang di Pulau Galang melalui mekanisme pertemuan internasional di Geneva, (5) Indonesia mematahkan mitos bahwa demokrasi tak akan berkembang di negara Islam, dan (6) Indonesia bermitra dengan Uni Eropa dan AS yang menjadi tumpuan bantuan ekonomi bagi Myanmar. Langkah strategis Indonesia dalam menyelesaikan masalah ini, antara lain menyelenggarakan pertemuan regional masalah Rohingya dengan menghadirkan negara terkait, seperti Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Banglades dan negara donor, seperti Uni Eropa dan AS dan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, Bank Dunia, dan Asean Development Bank (ADB).

---

<sup>54</sup> Redi Panuju. *Jurnalisme Konflik Rohingya*. Kompas, Rabu 6 September 2017, h.7.

Indonesia dapat menggunakan mekanisme di bawah Bali Democracy Forum untuk memediasi.<sup>55</sup> Bali forum tidak membahas Rohingya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki pantai luas, secara alami memungkinkan disinggahi pengungsi. Di sisi lain, Indonesia belum menjadi anggota konvensi tentang Pengungsi 1951 tetapi rentan menjadi tempat mengadu bagi pengungsi. Hal ini sebagaimana ketidakpastian dan rasa frustrasi membuat puluhan pengungsi berasal dari Afganistan, Irak, Yaman, dan Sudan, Rabu 8 Februari 2017 berunjuk rasa di depan kantor perwakilan UNHCR di Jakarta. Yasser pengungsi dari Irak menyatakan, telah bertahun-tahun ia membawa keluarganya berpindah-pindah mulai dari Baghdad, Kuala Lumpur, Pekanbaru, Bogor, dan terakhir di emperan gedung tempat UNHCR berkantor di Jakarta. Dirjen Multilateral Kemenlu RI Hasan Kleib menyatakan, Indonesia tak memiliki domain untuk memastikan penempatan para pengungsi, hanya Negara transit, tidak berkewajiban menyediakan atau memberi izin kerja bagi pengungsi. Juru bicara UNHCR di Jakarta Mitra Salima menyatakan, saat ini lebih dari 65 juta orang menjadi pengungsi dunia, 20 juta orang mendapat status pengungsi dari UNHCR, kurang dari 1 persennya dari 20 juta mendapatkan kesempatan ditempatkan kembali di negara ketiga. Ada 14 ribu pengungsi dan pencari suaka tinggal di Indonesia yang sebagian tinggal di rumah detensi imigrasi.<sup>56</sup>

## 7. Solusi dan Kontribusi

Pemerintah Indonesia dalam konflik di Rakhine Utara Myanmar memosisikan sebagai pihak ketiga untuk menengahi proses resolusi konflik, baik dari sisi pendekatan pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus melakukan politik merangkul kepada Myanmar. Apalagi di tengah tekanan yang besar dari dunia internasional, sehingga Indonesia dapat menempatkan diri sebagai teman bicara, melanjutkan bantuan kemanusiaan yang disalurkan untuk mengatasi dampak dari konflik. Sementara konfliknya sendiri perlu penanganan lain yang juga serius. Tanpa dihentikannya konflik tersebut, maka akan terus berjatuh korban dan pengungsi maka perlu langkah. Pertama, resolusi konflik

---

<sup>55</sup> Arif Havas Oegroseno. *Penanganan Komprehensif Rohingya*. Kompas, 27 Mei 2015, h.6.

<sup>56</sup> Kompas, Kamis, 9 Februari 2017.

atau menyelesaikan akar masalah konflik antar-pihak yang bertikai. Faktor-faktornya yaitu kebijakan diskriminatif, perebutan sumber daya dan kesempatan ekonomi, serta kepentingan dominasi kekuasaan politik. Kedua, *peace building* atau pembangunan perdamaian yaitu membangun kembali hubungan positif antarmasyarakat rentan dari kedua belah pihak untuk saling berinteraksi, menghilangkan stereotip negatif dan kecurigaan, hingga menjalin hubungan yang saling bergantung. Kepercayaan yang diberikan Myanmar kepada Indonesia untuk ikut menyelesaikan krisis Rohingya diharapkan dapat mendorong ASEAN agar lebih memperhatikan persoalan hak asasi manusia yang melampaui batas-batas negara.

Melakukan langkah diplomatik, pemerintah RI perlu mempertimbangkan langkah atas masukan pakar. Menurut Awaludin, diplomasi Indonesia harus menekankan pendekatan *soft diplomacy* (persuasi) karena Myanmar adalah rezim yang baru memasuki babak pencerahan yang sensitif dengan campur tangan pihak asing. Langkah diplomasi kehati-hatian dan tak boleh terkesan memaksakan kehendak apalagi menyalahkan Myanmar. Diplomasi acapkali dengan cara senyap, tidak gagap gempita yang diukur dengan pencapaian, bukan proses. Strategi dengan alasan kemanusiaan yang bersifat universal adalah cara yang paling elegan.<sup>57</sup> Menurut Djumala, ada tiga karakter utama diplomasi pada tataran teoretik dan praksis, yakni dialog, kompromi, dan antikekerasan. Dialog merupakan inti perilaku diplomasi, kedua belah pihak harus menghormati status masing-masing. Indonesia menghormati status Myanmar sebagai negara berdaulat, Menlu RI menemui pemimpin Myanmar dan melihat langsung fakta di lapangan, dipercaya mampu menumbuhkan pemahaman masalah secara obyektif dan komprehensif. Kedua, kompromi; Dalam diplomasi, tak pernah terjadi keinginan satu pihak terpenuhi dengan mengorbankan keentingan pihak lain. Terkait isu Rohingya, ada dua kutub kepentingan yakni Myanmar ingin etnis Rohingya keluar dari Rakhine, sedangkan masyarakat internasional mendesak agar Rohingya tetap tinggal di Rakhine berikut haknya sebagai warga Negara. Di lapangan terjadi konflik sehingga memerlukan suasana kondusif dan kedua belah pihak kompromi

---

<sup>57</sup>Hamid Awaludin. *Nestapa Rohingya. Kompas*, Kamis 7 September 2017, h. 6.

menahan diri untuk memulihkan keamanan. Dari situ baru bisa duduk semeja untuk mencari solusi politik. Ketiga, antikekerasan; diplomasi bisa efektif jika diterapkan tidak dengan kekerasan fisik. Penghentian kekerasan merupakan prekondisi untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan. Bertemunya Menlu RI dengan Suu Kyi menyampaikan usulan Formula 4+1 jika ditelisik butir 1,2, dan 3 mengandung karakter utama diplomasi yakni kompromi. Dunia mencatat, Menlu RI merupakan pejabat asing pertama yang diterima Myanmar sejak kekerasan pada Agustus 2017. Diterimanya Indonesia karena diplomasi yang santun, tegas, dan cerdas, juga Indonesia sebagai Negara muslim terbesar di dunia yang moderat. Moderasi politik dalam sosiokultur menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menghargai pluralisme sebagaimana Myanmar yang multi-etnik dan agama melihat Indonesia sebagai model.<sup>58</sup> Menurut Srikadini perlunya diplomasi kemanusiaan yang berbeda dengan diplomasi perdagangan, keamanan, dan lingkungan karena terikat pada konteks sebuah krisis, dalam waktu tertentu/*ad hoc*, dan teritorial tertentu dengan jangkauan yang luas. Keberhasilannya ditentukan oleh, pertama, komitmen pembuat kebijakan dan pemimpin Negara untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat rentan yang terkena dampak krisis. Kedua, akses kemanusiaan yang lebih luas. Ketiga, memobilisasi sumber daya. Keempat, fasilitasi terhadap *partnership* bagi masyarakat yang terkena dampak. Penguatan diplomasi kemanusiaan Indonesia makin kuat pertama, pemerintah Myanmar melemah terhadap Rohingya akibat tekanan dunia internasional. Kedua, menggunakan metode diplomasi tidak langsung dengan tanpa menyalahkan Myanmar dan tak mempermalukannya (*not blaming and not shaming*). Ketiga, memobilisasi kerja sama dengan organisasi kemanusiaan lain.<sup>59</sup>

Ragam upaya yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla masih dihadapkan dengan problem pokok yang belum terselesaikan. Hingga minggu kedua September 2017, data UNHCR, ada 270.000 pengungsi Rohingya di Banglades yang membutuhkan air bersih, sanitasi, dan bahan makanan secepatnya. Banglades sebagai

---

<sup>58</sup>Darmansjah Djumala. *Diplomasi untuk Rohingya*. Kompas, Sabtu 9 September 2017, h.7.

<sup>59</sup>Annisa Gita Srikandini. *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar*. Kompas, Jumat 8 September 2017, h.7.

negara termiskin di dunia membuka lahan 607 ha untuk kamp pengungsi dan mengusulkan pembentukan zona aman yang dikelola lembaga kemanusiaan. Persoalannya, Myanmar harus menghentikan kekerasan pada Rohingya dan menerima kembali.<sup>60</sup> ARSA pada Minggu 10 September 2017 menyatakan gencatan senjata selama sebulan untuk memberi kesempatan bantuan kemanusiaan masuk ke Myanmar. Data Lembaga Dokter Lintas Batas (MSF) sejak operasi militer tentara Myanmar digelar di Rakhine sejak 25 Agustus–24 September 2017 ada 6.700 warga Rohingya tewas (kebanyakan tertembak/69 persen, ada yang diperkosa, dipukul/ 5 persen, dan dibakar hidup-hidup/9 persen, usia anak tewas akibat ditembak ada 730 anak) bagi yang selamat, selanjutnya mengungsi di kamp pengungsian Cox’s Bazar, Banglades. Warga yang selamat tersebut, ada 11.000 yang disurvei MSF memberi data tersebut. PBB menyatakan bahwa perilaku Myanmar terhadap Rohingya adalah pembasmian etnis (genosida). Pemerintah Myanmar berdalih bahwa korban tersebut imbas penyerangan Rohingya pada polisi.<sup>61</sup> Dalam aspek lain, pengungsi dari etnis Rohingya yang menyelamatkan diri ke Banglades merupakan korban persekusi (*well-founded fear of being persecuted*). Persekusi merupakan pelanggaran berat yang dilakukan dengan sengaja terhadap hak dasar manusia yang bertentangan dengan hukum internasional. Pihak yang dipersekusi karena perbedaan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jender, dsb. Pelaku persekusi merupakan pelanggar berat/serius terhadap hak dasar manusia yang diatur dalam hukum internasional karena sifatnya diskriminatif dan menyengsarakan.

Respon Dunia atas Rakhine tahun 2017 antara lain <sup>62</sup>

Waktu	Lembaga/Negara Peduli	Respon
29/8/ 2017	PBB	Sekjen PBB meminta Banglades membantu Rohingya
29/8/ 2017	Komisi independen penanganan Rohingya	Agar kewarganegaraan etnis Rohingya diakui

<sup>60</sup> *Kompas*, Sabtu 9 September 2017.

<sup>61</sup> *Kompas*, Jumat 15 Desember 2017.

<sup>62</sup>*Kompas*, Rabu dan Jumat 6 dan 8 September 2017.

		Myanmar
29/8/ 2017	Thailand	Siap menerima pengungsi Rohingya
29/8/2017	Banglades	PM Banglades: meminta AS menekan Myanmar agar menghentikan masuknya pengungsi Rohingya di Banglades
30/8/2017	Turki	Menlu Turki: Agar Banglades membuka perbatasannya, Turki siap membantu pembiayaannya.
1/9/ 2017	Indonesia	Presiden Jokowi: Indonesia menyesalkan dan membantunya
3/9/2017	Bulan Sabit Merah Iran	40 ton bantuan makanan (Rp 1,3 miliar), perawatan, sanitasi
7/9/2017	Pusat Manajemen Bencana Muhammadiyah	Merencanakan membangun pasar perdamaian di Rakhine

Selain itu, Amerika memberikan tambahan bantuan 47 juta dollar AS sehingga bantuan yang dikucurkan sebanyak 87 juta dollar AS sejak Agustus 2017 kepada Rohingya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Kompas*, Jumat 24 November 2017.

## 8. Minimnya Peran ASEAN

Menurut Amnesty International, krisis yang terjadi di Rakhine tidak dapat diakhiri jika politik apartheid masih eksis. Apartheid sejak 1982 dengan diberlakukannya UU Kewarganegaraan yang tidak mengakui Rohingya sebagai orang Myanmar. Tim Penyelidik Amnesty International untuk isu Rohingya, sejak November 2016-2017 menemukan fakta, pada tahun 2012, kebijakan apartheid semakin buruk seperti pelarangan dari pemerintah Myanmar terhadap orang Rohingya pada sebuah desa bila menggunakan jalan tapi hanya sungai, tidak boleh meninggalkan wilayah desa atau kecamatannya kecuali izin khusus karena tiap desa ada pos khusus untuk memeriksa izin. Akibatnya, banyak warga Rohingya tidak bisa bekerja, bersekolah, dan tidak mengakses layanan kesehatan. Akhir 2017, warga juga dilarang berpolitik praktis. Suu Kyi tak mampu berbuat banyak karena pembuat peraturan dan pelaksana apartheid adalah lembaga serta orang yang dikuasai militer. Sebelum Liga Nasional untuk Demokratik (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menang dalam pemilu 2015, militer Myanmar berkuasa selama 40 tahun membuat aturan untuk mempertahankan kekuasaannya. Hampir seluruh pejabat dan birokrat adalah tentara atau bekas tentara yang patuh pada atasannya. Dari 11 anggota Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional, 6 orang ditunjuk *tatmadaw* (militer Myanmar), Dewan berwenang membekukan pemerintahan. Dewan mengontrol Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Urusan Perbatasan, dan Kementerian Pertahanan. Kementerian tersebut yang berwenang membuat kebijakan yang apartheid. Ada 25 persen anggota parlemen ditunjuk Tatmadaw. Tatmadaw terlibat kekerasan masif di Rakhine sejak 2012. Pada Agustus 2017, Panglima Tatmadaw Jenderal Min Aung Hlaing melancarkan operasi brutal setelah 30 pos polisi diserang pemuda Rohingya (ARSA), membunuh polisi dan merampas senjatanya. Menlu AS Rex Tillerson setelah berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan beberapa tokoh menyimpulkan, Myanmar telah melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya.<sup>64</sup> Tillerson mengadakan pertemuan pula dengan Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Hasil pertemuan itu, Tillerson menyatakan, pentingnya investigasi independen dan imparsial untuk

---

<sup>64</sup> *Kompas*, Minggu 26 November 2017.

menyelidiki semua tuduhan yang ditujukan pada militer. Siapa pun yang melakukan harus bertanggung jawab.<sup>65</sup>

Amnesty menambahkan, ASEAN cenderung berlandung pada prinsip untuk tidak saling mencampuri atau nonintervensi. Pada KTT ke-31 ASEAN November 2017 tidak memasukkan kata Rohingya dalam dokumen akhir.<sup>66</sup> Menyikapi krisis Rohingya, Sekretariat ASEAN Kamis 16 November 2017 menyatakan, memilih menyatakan dukungan kepada pemerintah Myanmar yang menggandeng Palang Merah dan komunitas internasional menggelar program kemanusiaan di Rakhine dan perlunya perluasan akses bantuan kemanusiaan untuk memastikan keselamatan, mengakhiri kekerasan, dan memulihkan keadaan. Dokumen setebal 28 halaman itu lebih menggunakan istilah orang terdampak, bukan Rohingya. Pemimpin ASEAN memilih memfokuskan perhatian pada misi kemanusiaan dan pemulihan stabilitas.<sup>67</sup> Selama ini ASEAN tidak mampu berbuat banyak ketika muncul persoalan kemanusiaan yang terjadi di dalam batas negara masing-masing anggota karena ASEAN menganut prinsip non-intervensi. ASEAN belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. Problem di kawasan ASEAN, kita terjebak pada semangat komunal kedaulatan, semangat komunal nonintervensi yang menghambat terdorongnya kemajuan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Prinsip nonintervensi, yang tercantum dalam Piagam ASEAN pada 1967, memberikan legitimasi kepada para anggota ASEAN untuk tidak mencampuri urusan internal negara masing-masing. Human Rights Watch (HRW) yang memfokuskan laporan perihal penggunaan kekerasan seksual menyimpulkan terjadinya kejahatan kemanusiaan dan genosida oleh militer Myanmar.<sup>68</sup>

Dengan tekanan dari berbagai pihak, Myanmar dan Bangladesh akhirnya menyepakati perjanjian repatriasi migran Rohingya ke Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Kesepakatan pengaturan cara pemulangan pengungsi yang ditandatangani oleh wakil Myanmar dan Bangladesh di Naypyidaw, Myanmar pada Kamis 23 November 2017. Proses pemulangan ditargetkan dalam dua bulan.

---

<sup>65</sup> *Kompas*, Kamis 16 November 2017.

<sup>66</sup> *Kompas*, Rabu 22 November 2017.

<sup>67</sup> *Kompas*, Rabu 17 November 2017.

<sup>68</sup> *Kompas*, Rabu 17 November 2017.

Akan tetapi, belum ada kejelasan jumlah warga Rohingya yang akan dipulangkan. Padahal, sebagian enggan kembali ke Rohingya kecuali diberi kewarganegaraan penuh oleh Myanmar. Bangladesh hingga akhir November 2017 menampung 620.000 orang Rohingya di Cox's Bazar karena lari dari operasi militer Myanmar, meski militer berdalih operasi digelar untuk kelompok radikal Pasukan Pembela Arakan Rohingya (ARSA). Sementara itu, di tengah sorotan dunia, militer Myanmar dan militer China mempererat kerja sama militer dan ekonomi. China membangun jaringan pipa di Myanmar untuk mengalirkan gas dan minyak dari Teluk Benggala ke penyulingan di Yunnan yang melewati Rakhine. Selama ini, China mengandalkan Selat Malaka untuk jalur pasokan migas.<sup>69</sup> Di tengah meredanya ketegangan, Rabu 20 Desember 2017 Myanmar menolak kedatangan pelapor khusus PBB untuk HAM Januari 2018. Tugasnya menggelar penyelidikan independen soal HAM atas dugaan PBB bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap warga Rohingya. Alasan penolakan karena dianggap bias atau tidak obyektif.<sup>70</sup>

Pada perkembangannya, nasib pengungsi Rohingya belum tuntas. Pengungsi ditampung oleh Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Aceh di sanggar kegiatan belajar (SKB). Sanggar akan digunakan untuk pelatihan pegawai dan kegiatan lain. Tahun 2019 tak dianggarkan penanganannya oleh Bireuen. Dari 79 pengungsi yang terdampar Jumat 20 April 2018, 34 melarikan diri dari penampungan. Badan urusan pengungsi PBB pun menghentikan subsidi anggaran. Penjagaan pengungsi sangat lemah karena tak ada biaya pengamanan. Pengamanan hanya dilakukan oleh Satpol PP dan relawan tanggap bencana.<sup>71</sup> Selanjutnya 72 orang dari 79 pengungsi tersebut kabur secara bertahap ke Malaysia melalui Sumatera Utara. Masih ada 7 orang bertahan yakni 2 perempuan, 2 lelaki, dan 3 anak-anak. Sepanjang Desember 2018 hingga Maret 2019 terdapat 11 kali imigran kabur pada malam hari.<sup>72</sup> Kondisi tersebut, bara masih menganga di Rakhine. Serangan 60 anggota pemberontak Tentara Arakan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar Sabtu tengah malam 9 Maret 2019 menewaskan sembilan polisi Myanmar. Padahal,

---

<sup>69</sup> *Kompas*, Jumat 24 November 2017.

<sup>70</sup> *Kompas*, Jumat 22 Desember 2017.

<sup>71</sup> *Kompas*, Senin 21 Januari 2019.

<sup>72</sup> *Kompas*, Jumat 8 Maret 2019.

seminggu sebelumnya militer Myanmar mengumumkan gencatan senjata sepihak terhadap kelompok etnis bersenjata di Myanmar.<sup>73</sup>

Hingga ditulisnya naskah ini, Indonesia merupakan negara yang dipercaya pemerintah Myanmar yang ditandai diterimanya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi oleh Aung San Suu Kyi yang menjabat Konseler Negara atau pemimpin tertinggi (yang sebenarnya) di Myanmar, Senin 04 September 2017. Indonesia juga telah menyerahkan bantuan pembangunan rumah sakit kepada pemerintah Myanmar untuk komunitas Rakhine pada Selasa 10 Desember 2019. Rumah sakit tersebut, menurut Dubes RI untuk Myanmar, Iza Fadri, merupakan hasil kesepakatan antara Presiden Myanmar U Htin Kyaw dan Wapres RI, Jusuf Kalla (saat itu) di sela-sela KTT Asia-Europe Meeting (ASEM) di Mongolia tahun 2016. Pembangunan tersebut merupakan kolaborasi antara MER-C (organisasi kemanusiaan Indonesia), Palang Merah Indonesia (PMI) dan komunitas masyarakat Buddha Indonesia (Walubi). Rumah sakit tersebut bangunan utamanya seluas 2.214 m, luas tanah 4.644 m, bangunannya meliputi ruang utama (ruang operasi, UGD, ruang pindai sinar X/X-Ray).<sup>74</sup>

Oleh karena itulah, selain memberikan bantuan kemanusiaan, Indonesia menjadi "penghubung" dari negara-negara lain yang ingin membantu menyelesaikan persoalan di Myanmar. Hal ini membutuhkan solusi diplomatik Indonesia, baik melalui ASEAN atau melalui diplomasi bilateral Indonesia dengan Myanmar.

### C. Penutup

Kepedulian pemerintah Indonesia atas penderitaan yang dialami etnis muslim Rohingya di Myanmar akibat arogansi pemerintahan Myanmar sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dua upaya riil berupa pemenuhan kebutuhan hidup bagi pengungsi Rohingya dan upaya diplomatik perlu dievaluasi keberlangsungan dan keberhasilannya. Bila tidak dikawal, genosida menjadi bukti keangkuhan negara dan warga mayoritasnya terhadap minoritas tak akan berakhir. Problem mendasar yang harus disikapi pemerintah RI adalah upaya membangkitkan kepedulian ASEAN atas penderitaan Rohingya. Ketidakpedulian ini akibat prinsip Negara

---

<sup>73</sup> *Kompas*, Senin 11 Maret 2019.

<sup>74</sup> CNNIndonesia.com, Rabu 11 Desember 2019.

ASEAN untuk tidak mencampuri dan non-intervensi masalah yang dihadapi Myanmar pada Rohingya. Dalih ini merupakan wujud tidak pekanya ASEAN atas nasib Rohingya. Peran PBB (UNHCR) perlu didukung oleh negara lain agar persoalan pengungsi tak berlarut-larut tanpa kendali. Hal yang perlu dikawal dan dievaluasi adalah pelaksanaan repatriasi migran Rohingya ke Negara Bagian Rakhine, Myanmar berdasarkan kesepakatan pengaturan cara pemulangan pengungsi pada Kamis 23 November 2017. Proses pemulangan ditargetkan dalam dua bulan. Persoalan pengungsi merupakan persoalan global sehingga perlunya dimunculkan gagasan perlunya Indonesia menjadi anggota Konvensi tentang Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Penanganan pada pengungsi, Indonesia berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 9, Pasal 10 dan Pasal 13 yang mengatur perihal orang asing. Perlindungan hukum bagi pengungsi sesuai ketentuan Konvensi Pengungsi 1951 meliputi prinsip tidak memulangkan (*nonrefoulement*), tidak mengusir (*nonexpulsion*), tak membedakan (*nondiscrimination*), tak melakukan tindak pidana. Keanggotaan konvensi pada dasarnya sebagai bukti nyata mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

## Daftar Pustaka

- Awaludin, Hamid. *Nestapa Robingya*. *Kompas*, Kamis 7 September 2017.
- Djumala, Darmansjah. *Diplomasi untuk Robingya*. *Kompas*, Sabtu 9 September 2017.
- Oegroseno, Arif Havas. *Penanganan Komprehensif Robingya*. *Kompas*, 27 Mei 2015.
- Panuju, Redi. *Jurnalisme Konflik Robingya*. *Kompas* Rabu 6 September 2017.
- Saifullah. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2010.
- Singh, Bilveer. *Tantangan Orang Robingya Myanmar Menghadapi Satu Minoritas Teraniaya dan Implikasi untuk Keamanan Nasional dan Regional*. UGM Press: Yogyakarta. 2014.
- Srikandini, Annisa Gita. *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar*. *Kompas*, Jumat 8 September 2017.